

Banyak Jabatan Kosong, Kinerja SKPD Depok Kurang Optimal

DEPOK (IM)- Lebih dari 100 jabatan eselon II, III, IV di jajaran Pemerintah Kota (Pemko) Depok sudah lebih dari setahun kosong dan jabatan tersebut hanya dijabat pelaksana tugas (Plt). Kepala Keasistenan Riksa 6 Ombudsman Republik Indonesia bidang kepegawaian, Ahmad Sobirin mengatakan, Wali Kota Depok, Mohamad Idris harus segera melakukan pengisian jabatan kosong karena berakibat kurang geregetnya kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD). "Di Kota Depok banyak posisi kosong membuat SKPD tak maksimal saat harus melaksanakan program-program kerjanya," ujar Sobirin, Minggu (1/8).

Menyebutkan contoh, Sobirin mengatakan kuartal II 2021 serapan anggaran Kota Depok baru terserap 30 persen dari Rp3,8 triliun. Padahal, idealnya di kuartal II, anggaran itu harus terserap hingga 50-70 persen. Dan total belanja langsung sebesar Rp3,8 triliun, baru terserap 30 persen atau sekitar Rp1,140 triliun. "Artinya, masih Rp2,660 triliun lagi yang belum terserap untuk pembangunan infrastruktur, ini baru satu contoh," ucapnya.

Maka itu, tegas dia Idris selaku kepala daerah di Kota Depok supaya segera melakukan rotasi dan mutasi pejabat karena berakibat kurang optimalnya kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Menjawab Sobirin, Sekretaris Daerah Kota Depok yang baru, Supian Suni mengatakan Pemerintah Kota (Pemko) Depok akan segera melakukan pengisian jabatan yang masih kosong. "Targetnya, pengisian jabatan menunggu petunjuk Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Supian menuturkan pengisian jabatan kosong tidak sampai akhir tahun 2021. Ia mengakui, proses pengisian jabatan eselon II, III, IV mendesak karena banyak kosong.

Supian menambahkan, mulai pekan ini pihaknya akan melakukan lelang jabatan (open bidding) untuk jabatan Kepala Dinas/Kepala Badan. Untuk eselon II atau Kepala Dinas/Kepala Badan, ada beberapa jabatan kosong dan hanya dijabat oleh pelaksana tugas (Plt). Demikian jabatan eselon III dan eselon IV banyak juga mengalami kekosongan dan hanya dipundaki Plt. "Jumlah jabatan kosong di Kota Depok tak sampai ratusan," imbuh Supian.

Sebagaimana diketahui, saat ini setidaknya beberapa jabatan kepala OPD di lingkungan Pemko Depok kosong. Kekosongan jabatan tersebut sudah berlangsung enam bulan hingga satu tahun. Kekosongan jabatan itu kini diisi oleh Plt. Padahal, seharusnya seorang Plt hanya boleh menjabat dengan kurun waktu enam bulan. ● yan

Anies Wacanakan Syarat Wajib Vaksin, Epidemiolog: Vaksinasi Harus Capai 70%

JAKARTA (IM)- Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan berencana menjadikan syarat sudah divaksinasi untuk mengakses sejumlah tempat di Jakarta. Hal ini kemungkinan dilakukan saat pelonggaran pembatasan dilakukan.

Ahli epidemiologi dari Griffith University, Dicky Budiman, mengatakan hal ini bagus untuk diterapkan. Namun, dengan catatan harus memastikan ketercapaian vaksinasi 70% se Provinsi DKI Jakarta. Dan setiap kecamatan harus sudah memenuhi minimal 50% vaksinasi. Hal ini perlu dipastikan untuk memenuhi prinsip kesetaraan dan keadilan.

Dicky juga menekankan, 70% capaian vaksinasi tersebut harus dua dosis vaksin Covid-19. "Sebanyak 70% itu bicara DKI Jakarta ya. Itu cakupan secara provinsi 70% tapi kalau bicara kecamatan minimal 50%. Jadi bisa ada yang 60% tapi jangan sampai ada kecamatan yang cuma 20%. Itu berbahaya, gak boleh. Dan itu maksudnya dua dosis lengkap," tegas Dicky saat dihubungi, Minggu (1/8).

Selain itu, ia mengingatkan juga kalau syarat pelonggaran bukan dari cakupan vaksinasi saja. Namun, utamanya juga dari angka tes positivity rate yang sudah rendah. Untuk DKI Jakarta, Dicky menyarankan positivity rate ditekankan di bawah 10% baru bisa untuk membuka pelonggaran pembatasan.

Dicky menilai syarat vaksinasi untuk mobilitas bisa menjadi suatu hal yang baik. Karena mendorong mempercepat vaksinasi di masyarakat. Anies sebelumnya menjelaskan, kebijakan mengenai vaksinasi menjadi persyaratan administrasi bagi warga untuk bisa melakukan berbagai aktivitas. Persyaratan ini juga merupakan upaya untuk melindungi warga yang belum tervaksinasi agar bisa segera memperoleh vaksinasi.

Anies menyatakan, kebijakan ini diambil dengan mempertimbangkan riset ilmiah di bidang medis dan didukung dengan fakta lapangan di Jakarta bahwa vaksinasi terbukti mampu menurunkan risiko keparahan dan risiko kematian akibat Covid-19. ● yan

4 Metropolis



ANIES BASWEDAN TINJAU HARIMAU YANG TERPAPAR COVID-19

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kanan) dan Kepala Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan (TMR) Endah Rumiwati (kiri) menyampaikan keterangan pers usai meninjau Harimau Sumatra yang terpapar COVID-19 di TMR, Jakarta, Minggu (1/8). Anies mengatakan bahwa pihaknya akan memastikan kondisi kedua Harimau Sumatra, Hari dan Tino yang didiagnosis positif COVID-19 pada 15 Juli lalu memperoleh perawatan intensif hingga dinyatakan sehat secara medis.

Anies: 900 Gerai Vaksinasi Merdeka Hadir di Permukiman Masyarakat

Program vaksinasi yang sekarang diluncurkan menjadi solusi bagi masyarakat Jakarta karena hadir di lokasi dekat mereka tinggal sehingga mudah diakses. Menurut Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, vaksin telah terbukti menurunkan risiko terjadinya fatalitas dan gejala berat jika seseorang terpapar virus.

JAKARTA (IM)- Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyebutkan, saat ini tersedia lebih dari 900 gerai vaksin dalam Gerakan Vaksinasi Merdeka yang akan

menjangkau lokasi tempat tinggal masyarakat. Vaksinasi Merdeka resmi diluncurkan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang berlangsung mulai 1-17 Agustus 2021 dalam rangka menyambut HUT ke-76 Republik Indonesia, di Polda Metro Jaya, Minggu (1/8).

Menurut Anies, vaksin telah terbukti menurunkan risiko terjadinya fatalitas dan gejala berat jika seseorang terpapar virus.

"Program vaksinasi yang sekarang diluncurkan menjadi solusi bagi masyarakat Jakarta karena hadir di lokasi dekat mereka tinggal sehingga mudah diakses. Akan ada lebih dari 900 gerai vaksin," kata Anies dalam peluncuran Vaksinasi Merdeka di Polda Metro Jaya.

Menurut Anies, vaksin telah terbukti menurunkan risiko terjadinya fatalitas dan gejala berat jika seseorang terpapar virus. Meski tidak menjamin akan mencegah penularan, vaksin mampu mencegah terjadinya gejala berat dan risiko jika seseorang terpapar. Apalagi, Pemprov DKI Jakarta bersiap membuka kembali kegiatan dan aktivitas masyarakat, namun dengan syarat pelaku di dalamnya harus mengikuti vaksin terlebih dahulu.

"Sama seperti kita mewajibkan kendaraan roda dua. Mau ke jalan raya boleh, tetapi pakai helm. Apakah helm menghindari kecelakaan, tidak. Naik motor tetap harus mengikuti

rambu lalu lintas, sama seperti pergi harus tetap ikuti protokol kesehatan. Tetapi bila terjadi kecelakaan, risiko terjadinya cedera berat di kepala jadi lebih kecil karena pakai helm," kata Anies.

Oleh karenanya, Anies mengajak warga Jakarta yang belum mendapat layanan vaksin Covid-19 untuk mendatangi sejumlah gerai vaksin tersebar yang disediakan Polda Metro Jaya. Vaksinasi Merdeka yang melibatkan berbagai unsur relawan seperti mahasiswa, dokter, perawat dan organisasi kemasyarakatan ini akan menyasar hingga tiga juta warga DKI mendapat layanan vaksin.

● yan

Harimau Ragunan yang Tertular Covid-19 Tidak akan Tulari Manusia

JAKARTA (IM)- Tino (9), dan Hari (12), dua harimau sumatra yang terinfeksi Covid-19 mengandung virus aktif," ujar Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta, Suzi Marsitawati, dalam keterangan tertulis, Minggu (1/8). Asal-usul penularan virus Covid-19 terhadap Tino dan Hari sedang ditelusuri. Menurut Suzi, kedua harimau itu terpapar Covid-19 saat Taman

Margasatwa Ragunan sedang tutup karena PPKM Level 4 dan tidak ada pengunjung yang datang. Perawat serta petugas kebun binatang Ragunan yang kontak langsung dengan Tino dan Hari juga diperiksa. "Tidak ada yang terpapar Covid-19. Sehingga, kami masih menelusuri penyebabnya," kata Suzi.

Tino mengalami gejala terangkat Covid-19 diketahui pada 9 Juli. Margasatwa Ragunan sedang tutup karena PPKM Level 4 dan tidak ada pengunjung yang datang. Perawat serta petugas kebun binatang Ragunan yang kontak langsung dengan Tino dan Hari juga diperiksa. "Tidak ada yang terpapar Covid-19. Sehingga, kami masih menelusuri penyebabnya," kata Suzi.

Tino yang masih berusia 9 tahun mengalami sakit dengan gejala klinis sesak nafas, bersin, keluar lendir dari hidung, dan penurunan nafsu makan. Selang dua hari kemudian, kondisi Hari yang memburu. Gejalanya yang sama dengan Tino. Pada 14 Juli, Tino dan Hari dites swab yang sampelnya dikirim ke laboratorium Pusat Studi Satwa Primata, IPB Bogor. "Hasilnya

keluar 15 Juli yang menyatakan bahwa kedua satwa terpapar Covid-19," kata Suzi. Setelah dinyatakan sakit Covid-19, kedua satwa Ragunan itu segera diobati, diberi antibiotik, antihistamin, antiradang, dan multivitamin setiap hari. Dalam waktu sekitar 10 - 12 hari pengobatan, kondisi kedua harimau berangsur membaik dan pulih. ● yan



IDN/ANTARA

KONDISI DKI JELANG BERAKHIRNYA MASA PPKM

Pengendara melintas dijalan penyekatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Jakarta, Minggu (1/8). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengklaim kondisi penyebaran virus corona di Ibu Kota mulai melandai. Hal ini tak lepas dari kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang akan berakhir pada Senin (2/8).

Sistem Penyaluran Bantuan di DKI Perlu Dibenahi

JAKARTA (IM)- Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta, Harry Ara menyebutkan Pemerintah Provinsi DKI perlu membenahi sistem penyaluran bantuan tunai maupun nontunai agar lebih transparan. "Pemerintahan hari ini perlu memperbaiki sistem, bukan menunjuk yang salah, tapi menjadi sistem yang transparan. Sehingga Jakarta dapat dibangun secara sistem dan partisipasi publik dapat meningkat," kata Ara, Sabtu (31/7).

Hadir pada diskusi tersebut antara lain Harminus (Wakil Ketua KI DKI Jakarta), Mujiyono (Anggota Banggar DPRD DKI Jakarta), Abdul Aziz Muslim (Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta), Premi Lasari (Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta), Uchok Sky Khadafi (Direktur Eksekutif Center For Budget Analysis), serta Verry Ardian (Kepala Seksi Data dan Informasi Dinas Kesehatan DKI Jakarta).

Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Premi Lasari menuturkan validasi data bantuan sosial sesuai Pasal 55 Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021, disebutkan salah satu kriteria penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) APBD maupun APBN tidak boleh double (ganda). "Sehingga data penerima BST APBD kami lakukan 'cleansing' (pembersihan) pada Februari 2021 berdasarkan usulan musyawarah kelurahan," ujar dia.

Anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta sekaligus Ketua Komisi A, Mujiyono mengakui penanganan Covid-19 di DKI Jakarta lebih baik dibanding nasional, meskipun terdapat beberapa koreksi atau perbaikan. "Alokasi anggaran Rp 5,1 triliun untuk pengolahan dan penanganan Covid-19 di DKI, namun banyak hal di luar dugaan dana tersebut masih kekurangan setelah ada gelombang kedua Delta," kata Mujiyono.

Sementara, Wakil Ketua KI DKI Jakarta, Harminus meyakinkan kiprah KI Provinsi DKI Jakarta sebagai preventif melakukan sosialisasi berkelanjutan kepada Badan Publik DKI untuk transparan sesuai PERKI standar layanan informasi publik (SLIP). Harminus menyebutkan tidak hanya partai politik, sekolah menengah, kecamatan, dan kelurahan, namun badan publik juga harus terus menyampaikan secara berkelanjutan pemutakhiran data terutama daftar informasi publik (DIP) agar sigap menyampaikan informasi berkaitan dengan penanganan Covid-19.

"Tu sesuai amanah UU Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 melalui media yang dimiliki," kata Harminus.

Pemprov DKI Jakarta telah menyalurkan BST PPKM pada pekan ketiga Juli 2021 sebesar Rp 600 ribu selama dua bulan. BST Pemprov DKI disalurkan melalui rekening Bank DKI dan hak masyarakat tidak akan hilang karena tersimpan aman di rekening Bank DKI.

DKI Jakarta juga menjadi satu-satunya provinsi penyalur BST dari APBD dengan total dana bansos tunai sebesar Rp 604 miliar untuk penerima sebanyak 1.844.833 kepala keluarga. Selain itu, juga diberikan bansos non tunai berupa beras seberat 10 kilogram bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terkena dampak PPKM hingga tingkat RW dan bertahap sampai 17 Agustus 2021. ● yan

Pembekab Bekasi Targetkan Pembebasan Lahan Jalan Cikarang-Cibarusah Rampung Tahun Ini

CIKARANG SELATAN (IM) - Pj. Bupati Bekasi, Jawa Barat, Dani Ramdan, menginstruksikan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) untuk membuat tim khusus penanganan pelebaran Jalan Cikarang-Cibarusah. Hal tersebut dikatakannya saat meninjau secara langsung Rencana Pelebaran Jalan Cikarang-Cibarusah, Cikarang Selatan, Jumat (30/7).

"Ini secepatnya agar dibuat tim khusus penanganan pelebaran jalan Cikarang-Cibarusah. Jadi, bulan Januari sampai dengan Februari sudah ada," tuturnya dalam rilis Prokopim

Setda Kabupaten Bekasi, Jum'at (30/7) malam.

Dirinya juga mengatakan, agar pelebaran jalan pada tahun ini dapat diajukan dalam anggaran perubahan. Dengan target tahun ini pembebasan lahan rampung, sehingga Dinas Bina Marga Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat melakukan pelebaran.

Menurut laporan Plt. Kepala Disperkimtan, Muchlis, terdapat 17 titik bidang tanah yang belum selesai pembebasan lahannya. Pelebaran jalan dimulai dari Kandang Roda sampai dengan pertigaan Jalan Raya Serang-Setu, sepanjang

kurang lebih 2.300 meter.

"Rencana Pembebasan Right Of Way (ROW) jalan yang akan diambil sepanjang 21 meter, lebar badan jalan existing 7 meter. Sementara, 8 meter sisi barat jalan diukur dari bibir perkerasan jalan, dan 6 meter sisi timur jalan diukur dari bibir perkerasan jalan," jelasnya.

Pelebaran jalan dilakukan sebagai bentuk penguraian kemacetan yang terjadi di Jalan utama Cikarang-Cibarusah yang menopang mobilitas masyarakat, di mana sebagian besar bekerja sebagai karyawan perusahaan di kawasan Hyundai, EJIP, dan Delta Silicon. ● mdl



Jalan Raya Cikarang-Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. FOTO: HUMAS PEMKOT BEKASI

Pj. Bupati Bekasi Dorong Peningkatan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah



DANI RAMDAN Pj. Bupati Bekasi

CIKARANG PUSAT

(IM) - Pj. Bupati Bekasi, Dani Ramdan, mendorong Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk melakukan peningkatan dan pembenahan pada penyelenggaraan Reformasi Birokrasi.

Hal tersebut dikatakannya saat menyerahkan penghargaan atas hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), bagi Perangkat Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun 2021 di Command Center, Diskominfoantik, Cikarang Pusat, Jum'at (30/7).

"Perangkat Daerah yang nilai capaian Reformasi Birokrasinya dibawah 60 persen, saya minta agar melakukan pembenahan terhadap delapan area perubahan, di antaranya deregulasi kebijakan, penataan organisasi, penataan pelaksanaannya, dan sistem manajemen sumber daya manusia," ucapnya.

Penghargaan atas Reformasi Birokrasi ini diserahkan langsung oleh Pj. Bupati Bekasi kepada perangkat daerah dan kecamatan yang mendapatkan nilai tertinggi dari hasil PMPRB.

"Bagi 3 Perangkat Daerah dan Kecamatan yang masuk dalam nilai tertinggi, akan kami berikan penghargaan dari Pemerintah Kabupaten Bekasi," ucap Pj. Bupati dalam rilis Prokopim Setda Kabupaten Bekasi, Jum'at (30/7) malam.

Dari hasil penilaian tersebut, diputuskan tiga perangkat daerah terbaik, yakni Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pendapatan Daerah, dan RSUD Kabupaten Bekasi.

"Selain Perangkat Daerah, tiga kecamatan terbaik juga kita berikan penghargaan, yakni Kecamatan Bojongsung, Kecamatan Cibitung, dan Kecamatan Cikarang Barat," ujarnya.

Lebih lanjut, Dani Ramdan mengatakan PMPRB tersebut berdasarkan hasil validasi dan verifikasi lembar kerja evaluasi oleh Tim Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, Inspektorat Kabupaten Bekasi, serta Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi.

Penilaian yang dilakukan perdana pada tahun ini, sebut dia, bertujuan untuk mengetahui dan memberikan apresiasi kepada kinerja para perangkat daerah dan kecamatan atas capaian Reformasi Birokrasi tertinggi. ● mdl

PENGUMUMAN
Guna memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 15 Th. 1999 tentang Bentuk-bentuk Tagihan yang dapat dikompensasikan sebagai setoran saham, dengan ini diumumkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham PT DAPUR AROMA NUSANTARA berkedudukan di Jakarta (perseroan) tanggal 29 Juli 2021 telah menyetujui peningkatan Modal Disetor perseroan yang semula sebesar Rp. 100.000.000,- menjadi sebesar Rp. 95.000.000.000,-. Sebagian dari penambahan Modal disetor perseroan tersebut, yaitu sejumlah Rp. 84.900.000.000,- dilakukan dengan mengkonversi hutang perseroan kepada para pemegang saham masing-masing, yaitu PT PADI HIJAU BERKAT sebesar Rp. 66.430.000.000,- dan PT MANDASARI JAYA PRATAMA sebesar Rp. 28.470.000.000,-. Jakarta, 2 Agustus 2021. DIREKSI